



Jurnal Nasional Pariwisata

Dampak Kepengurusan Ganda Pokdarwis: Studi Kasus Desa Wisata Nglanggeran

Annisa Nada Nuri, Vania Azra Erina, Ferdian Dwi Saputra, An'cahya Titin Nafisa
Program Studi S1 Pariwisata, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

**Corresponding email:*
annisanadanuri1404@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Peran keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan kegiatan wisata di desa wisata merupakan salah satu aspek yang sangat krusial. Hanya saja, pada saat ini masih marak dijumpai permasalahan terkait keterlibatan masyarakat di desa wisata. Melalui fenomena ini, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dampak dari kepengurusan ganda Pokdarwis di Desa Wisata Nglanggeran. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Hasil yang dijumpai dari penelitian ini adalah adanya praktik kepengurusan ganda yang tidak sesuai dengan aturan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2020 tentang Aturan Kepengurusan Pokdarwis, Desa Wisata, dan juga Perangkat Desa. Praktik kepengurusan ganda ini dapat terlihat dalam kepengurusan Pokdarwis dengan desa wisata dan juga Pokdarwis dengan perangkat desa. Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan, fenomena kepengurusan ganda ini terjadi sebagai upaya memaksimalkan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) akibat sulitnya regenerasi, sekaligus upaya untuk meminimalisir terjadinya konflik antar kepengurusan desa wisata. Berangkat dari hasil temuan ini, kelompok peneliti menyarankan kepada penelitian yang akan datang untuk mengeksplorasi perspektif masyarakat desa terkait Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2020. Hal ini dilakukan sebagai respon dari fenomena Desa Wisata Nglanggeran yang masih terdapat kasus kepengurusan ganda di dalamnya.

Kata Kunci: Keterlibatan masyarakat, Kepengurusan Ganda, Desa Wisata Nglanggeran, Pokdarwis

Abstract

The role of local community involvement in the development of tourism activities in tourist villages is a critical aspect. However, issues regarding community participation in these villages are still prevalent. In light of this phenomenon, the present study examines the impact of dual management within the Tourism Awareness Group (Pokdarwis) in Nglanggeran Tourist Village. This research adopts a qualitative descriptive approach, utilizing literature studies and interviews as data collection techniques. The findings of the study reveal the existence of dual management practices that do not comply with the regulations outlined in Governor Regulation No. 40 of 2020, which pertains to the management of Pokdarwis, tourist villages, and village apparatus. These dual management practices are observed in the overlap between the management of Pokdarwis and the management of the tourist village, as well as between Pokdarwis and village officials. Based on the interview data, this dual management phenomenon appears to be a strategy to optimize limited human resources due to challenges in generational succession, while also minimizing potential conflicts between different levels of village management. In light of these findings, the research team recommends that future studies explore the perspectives of the local community regarding Governor Regulation No. 40 of 2020. This recommendation responds to the ongoing issue of dual management in the Nglanggeran Tourist Village

Keywords: Community Involvement, Dual Management, Nglanggeran Tourist Village, Pokdarwis

PENDAHULUAN

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu kota yang memiliki berbagai daya tarik yang memikat para wisatawan untuk berkunjung. Menurut Goodstats (2023) melalui survei kota tujuan wisata terbaik, Daerah Istimewa Yogyakarta menempati posisi kedua sebagai kota

terbaik untuk wisata tepat berada di bawah Kota Denpasar di posisi pertama dengan persentase 66%. Menjawab dari tingginya antusiasme wisatawan untuk berkunjung, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kini turut melakukan berbagai perkembangan pariwisata, salah satunya melalui desa wisata. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berharap bahwa melalui desa wisata, kegiatan ini dapat menjadi instrumen yang efektif tidak hanya untuk meningkatkan perekonomian daerah, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat desa serta melestarikan alam dan budaya. Menurut Santoso (2022), pemberdayaan masyarakat mencakup pembangunan masyarakat (*community development*) serta pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*), yang selanjutnya terdapat *community driven development* yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang dijalankan oleh masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, pemberdayaan dalam desa wisata diharapkan dapat membuat masyarakat memiliki kesadaran dalam mengembangkan berbagai potensi dan kemandirian mereka agar mencapai kesejahteraan yang merata. Salah satu wujud keterlibatan masyarakat dalam perkembangan desa wisata dapat terlihat dalam banyak hal, mulai dari penyelenggara operasional kegiatan wisata seperti *tour guide* hingga mengurus urusan managerial seperti dalam aktivitas Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pokdarwis merupakan kelembagaan desa wisata yang terdiri dari sekelompok masyarakat yang memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masalah-masalah yang dihadapi sektor kepariwisataan serta bertanggung jawab penuh terhadap program pariwisata serta mendukung pertumbuhan kepariwisataan di sebuah desa wisata (Muhtadi, 2021).

Banyaknya posisi yang dapat diisi oleh SDM masyarakat desa membuat kegiatan wisata desa wisata ini diharapkan dapat melibatkan dan merangkul seluruh warga desa tanpa terkecuali. Pelibatan secara maksimal ini dilakukan agar dapat sejalan dengan prinsip ideal yang ada dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Prinsip-prinsip ini terdiri dari pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, kepastian penerimaan manfaat bagi masyarakat, dan edukasi pariwisata bagi masyarakat (Sunaryo, 2013). Dari prinsip tersebut, dapat dipahami bahwa peran masyarakat dalam pengembangan desa wisata berada dalam posisi yang sangat krusial dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan wisata di desa wisata.

Meskipun praktik pengembangan desa wisata di Yogyakarta sudah berjalan dengan masif, ternyata pengembangan desa wisata di DI Yogyakarta masih banyak memiliki permasalahan terkait keterlibatan masyarakat. Hal ini, tentu saja akan memengaruhi manfaat yang diterima masyarakat desa, terutama terkait kesejahteraan dan ketertinggalan baik secara fisik maupun nonfisik. Menurut Herdiana (2019), terdapat beberapa permasalahan umum yang terjadi di desa wisata, yaitu tidak dioptimalkannya peran masyarakat sehingga masyarakat tidak hanya merasa kurang memiliki rasa bangga terhadap pariwisata yang ada di desanya, tetapi juga masyarakat tidak mendapatkan keuntungan dari adanya kegiatan pariwisata yang ada di desa. Hal ini menunjukkan bahwa peran organisasi dalam mengedukasi masyarakat terkait pariwisata masih perlu diintegrasikan lebih jauh lagi agar dapat berjalan sesuai arah dan tujuannya (Komariah, *et al.*, 2018). Sistem kepengurusan yang bersifat terbuka dan *bottom-up* perlu diterapkan dan dievaluasi secara berkala. Pendekatan *bottom-up* dalam pariwisata adalah pendekatan pengelolaan yang memberikan keleluasaan penuh bagi masyarakat lokal untuk membentuk prinsip kerja mereka dalam setiap kegiatan perencanaan yang dilakukan di

suatu destinasi wisata. Hal ini ditujukan agar semua aspirasi masyarakat dapat ditampung dengan baik sehingga masyarakat dapat membangun kepercayaan dan rasa memiliki dalam kegiatan wisata yang ada. Selain itu, pengintegrasian ini juga dapat mencegah adanya kepengurusan atau peran ganda di desa wisata yang saat ini kerap dijumpai di desa wisata.

Berangkat lebih jauh mengenai permasalahan ini, kelompok peneliti kemudian memilih Desa Wisata Nglanggeran sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji fenomena kepengurusan ganda yang ada disana. Desa Wisata Nglanggeran ini merupakan sebuah salah satu desa yang berada di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta. Desa ini secara administrasi terdiri dari lima dusun, yaitu Dusun Karang Sari, Dusun Doga sebagai pusat pemerintahan desa, Dusun Nglanggeran Kulon, Dusun Nglanggeran Wetan, dan Dusun Gunung Butak (Masterplan Desa, 2020).

Pembentukan Desa Wisata Nglanggeran ini diawali pada tahun 2008 dengan fokus pengembangan alam dan budaya setempat. Semakin lama, desa ini juga mengusung konsep berkelanjutan dengan mengedepankan ekowisata guna menjaga lingkungan, sembari meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga pengembangan atraksi wisata yang tidak merusak lingkungan, dan memberikan manfaat ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat (Hermawati, 2020). Atraksi utama yang dimiliki oleh Desa Wisata Nglanggeran berupa wisata alam berupa Situs Gunung Api Purba Nglanggeran sebagai Geosite dari Gunung Sewu UNESCO Global Geopark yang diakui di dunia sejak tahun 2015, Embung Nglanggeran, Curug Talang Purba, Kedung Kandang *Glamping*, dan Kampung Pitu. Tidak kalah menarik dari atraksi alam, Desa Wisata Nglanggeran juga menawarkan wisata edukasi berupa pembuatan batik kain dan batik topeng, kenduri, kreasi janur, dan olahan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) Dodol Kakao. Selain wisata alam dan edukasi, Desa Wisata Nglanggeran juga menawarkan wisata budaya dengan kesenian tradisional Jawa seperti karawitan, gejog lesung, reog, jathilan, dan hadroh (Hermawan, 2016).



Gambar 1. Papan Informasi di Desa Wisata Nglanggeran

Sumber: Dokumentasi Kelompok Peneliti

Dengan berkembangnya atraksi utama dari Desa Wisata Nglanggeran ini, terbentuklah Pokdarwis sebagai pengelola yang bertanggung jawab dalam mengembangkan potensi yang ada di desa wisata. Selain itu, Pokdarwis sendiri juga berperan sebagai perantara dari

pemerintah desa, masyarakat, dan pengunjung. Saat ini, manajerial pengembangan di Desa Wisata Nglanggeran dilakukan oleh organisasi Pokdarwis yang beranggotakan 154 orang (Hermawati, 2020).

Desa Wisata Nglanggeran mengalami proses panjang dalam perkembangannya. Dengan kerja keras dan dedikasi Pokdarwis, Desa Wisata Nglanggeran mendapat banyak apresiasi dan prestasi. Dilansir dari Jaringan Destinasi Wisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada tahun 2021 dan laman Desa Wisata Nglanggeran (2023), apresiasi dan prestasi dari Desa Wisata Nglanggeran berupa Juara II Pokdarwis Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2013, Penghargaan Desa Wisata Terbaik oleh Kemenparekraf, Penghargaan Desa Wisata Berkelanjutan 2021 oleh Kemenparekraf, Pemenang Desa Wisata Terbaik Asean konsep CBT Tahun 2017, Pemenang Asean Sustainable Tourism Award (ASTA) Tahun 2018, Pemenang Desa Wisata Terbaik Asean konsep CBT Tahun 2017, serta berbagai apresiasi dan prestasi lainnya. Akan tetapi, di balik berbagai apresiasi dan prestasi lainnya, terdapat permasalahan yang terjadi di Pokdarwis dari Desa Wisata Nglanggeran yaitu terjadinya peran ganda dalam kepengurusannya yang bersamaan dengan kepengurusan perangkat desa.

Terlepas dari semua kesuksesan yang telah diraih oleh Desa Wisata Nglanggeran, nyatanya desa wisata ini masih dihadapi oleh permasalahan umum yang sering dirasakan desa wisata pada umumnya terkait partisipasi masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari penelitian sebelumnya yang sempat mengkritisi terkait adanya hambatan dalam proses partisipasi aktif yang berasal dari turunya motivasi masyarakat, kualitas sumber daya manusia, dan kurang meratanya partisipasi aktif masyarakat lokal (Wijaya & Maryunani, 2022). Dengan kurang meratanya partisipasi aktif diantara masyarakat lokal, timbul sebuah permasalahan salah satunya ialah kepengurusan ganda. Kepengurusan ganda yang terjadi di Desa Wisata Nglanggeran berupa beberapa orang memiliki kedudukan di Pokdarwis maupun dalam perangkat desa. Hal ini dinormalisasikan karena dinilai lebih efektif dan efisien sehingga meminimalisasi konflik serta mempermudah dalam penyelesaian masalah bagi Pokdarwis dan perangkat desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 40 Tahun 2020. Akan tetapi, terdapat pula risiko yang dapat dialami jika kepengurusan ganda tetap dilangsungkan, seperti terjadi tumpang tindih dalam pengambilan keputusan yang mengarah pada pengelolaan yang tidak efisien dan mengakibatkan terganggunya keberlangsungan kegiatan wisata di suatu destinasi (Suhaimi, *et al.*, 2024). Oleh karena itu, dalam penelitian kelompok peneliti ini mengambil Desa Wisata Nglanggeran sebagai objek penelitian untuk mengetahui efektivitas kepengurusan Pokdarwis, terkhususnya pada kasus kepengurusan ganda. Ketidaksesuaian kondisi ideal dan realitas yang ada di Desa Wisata Nglanggeran menjadi hal yang menarik, mengingat popularitas Desa Nglanggeran yang dinobatkan sebagai Desa Wisata Terbaik (Kemenparekraf, 2021).

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan pemantik dalam penelitian ini berupa: *Bagaimana dampak dari kepengurusan ganda di Desa Wisata Nglanggeran bagi produktivitas desa sebagai otoritas administratif daerah dan juga desa wisata?*

TINJAUAN PUSTAKA

1. Desa Wisata

Yacop, *et al.*, (2021:4) mendefinisikan desa wisata sebagai bentuk integrasi kegiatan wisata yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat, yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Penyatuan atau integrasi yang menunjukkan keunikan tradisi dan tata cara kehidupan masyarakat lokal ini tidak hanya digunakan sebagai sarana peningkatan pariwisata, tetapi juga peningkatan budaya dan kualitas hidup masyarakatnya (Zhu, *et al.*, 2023). Dengan konsep pengembangan inilah, kemudian pelaksanaan pariwisata dalam desa wisata harus terencana secara terpadu dengan memperhatikan beberapa aspek terutama aspek ekonomi dan sosial-budaya dari masyarakat lokal (Hermawan, 2016). Aspek-aspek sosial ekonomi dalam desa wisata, terutama yang terkait dengan peran masyarakat lokal sangatlah penting karena selain mempengaruhi perkembangan desa wisata, peran masyarakat lokal pun membentuk pengalaman yang akan dirasakan oleh wisatawan yang berkunjung (Kastenholz, *et al.*, 2012). Oleh karena itu, investasi pelatihan dan pengembangan skill masyarakat lokal dalam pelibatan desa wisata perlu ditingkatkan karena menurut Devkant, K & S.C. Bagri (2018), rendahnya pendidikan dan kurangnya pengetahuan menjadi faktor dari hambatan praktikal dalam keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pariwisata.

Menurut Zielonko, *et al.* (2020), desa wisata identik dengan kegiatan wisata yang ditandai dengan daya tarik ruang terbuka, budaya dan warisannya, serta praktik-praktik tradisional yang dikelola oleh masyarakat yang berkelanjutan. Melalui daya tarik inilah aktivitas wisata pedesaan dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat desa untuk lebih memahami melestarikan habitat alami, keragaman hayati, sejarah, dan juga nilai-nilai kepercayaan serta budaya mereka (Sudheer, 2021). Meskipun demikian, dalam upaya pengembangan wisata budaya yang lebih berkelanjutan, diperlukan strategi atau pengembangan mekanisme yang memberikan perlindungan dan pencegahan untuk sosial-budaya baik yang terlihat maupun tidak terlihat dalam masyarakat agar dapat terus ada dan beregenerasi di masa depan (Zhu, *et al.*, 2023). Untuk mencapai keseimbangan tersebut, tentunya diperlukan adanya peran pemerintah dan masyarakat lokal yang mengatur kebijakan dan implementasinya guna menemukan solusi dalam setiap permasalahan yang ada (Liu, *et al.*, 2020). Hal ini juga dikarenakan partisipasi dan pengetahuan masyarakat lokal akan menjadi modal dan potensi yang besar untuk menghadapi pembangunan dan permasalahan yang akan datang di masa depan (Murdiyanto, 2011).

Berangkat lebih jauh dari konsep desa wisata ini, dapat dipahami bahwa selain digunakan sebagai kegiatan wisata sosial-budaya dan ekonomi, desa wisata juga merupakan objek potensial dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Adanya partisipasi yang tinggi dari masyarakat sebagai aktor utama dalam pengembangannya menjadikan desa wisata lebih berkelanjutan. Wujud partisipasi masyarakat ini tidak terbatas dalam aktivitas perencanaan semata, tetapi dalam pengambilan keputusan dan evaluasi (Arintoko, *et al.*, 2020). Hal tersebut dapat dikritisi melalui salah satu kesuksesan Desa Wisata Dewi Peri yang berhasil menjadi desa wisata yang menerapkan kode etik pariwisata dari UNWTO dan juga berhasil melibatkan 70% dari masyarakat lokal untuk dapat terlibat dalam kegiatan pengelolaan desa wisatanya sehingga dapat meraih kesuksesan mereka (Lestari, *et al.*, 2016). Akan tetapi, konsep

pengembangan desa wisata juga memiliki banyak hambatan dan tantangan tersendiri bagi para pengelolanya, hambatan dan tantangan ini dapat terlihat di Yogyakarta saat terdapat beberapa desa wisata di Jogja yang mengalami mati suri akibat belum adanya regenerasi pengurus inti di desa wisata tersebut (Razak, 2021).

2. Keterlibatan Masyarakat

Keterlibatan atau partisipasi masyarakat merupakan suatu bentuk kontribusi masyarakat kepada pembangunan yang dilakukan pemerintah, dengan ikut berperan serta dalam pengidentifikasian masalah, diskusi, pengambilan keputusan, ataupun pencarian solusi hingga eksekusi. Keterlibatan masyarakat merupakan hak sekaligus kewajiban masyarakat dalam mendukung tujuan yang ingin dicapai pemerintah, hal ini dapat berupa dukungan secara emosional, pikiran, tenaga, maupun modal. Keterlibatan oleh masyarakat dirasa sangat penting terhadap perkembangan desa karena jika masyarakat memberikan dukungan, seperti halnya penyampaian aspirasi dan lain hal berpengaruh pada perkembangan pariwisata desa, begitupun sebaliknya (Zhang, Inbakaran, & Jackson, 2006). Menurut Irawan (2019), dengan adanya peningkatan partisipasi masyarakat mempengaruhi pada berhasil tidaknya suatu program karena dalam realitas yang ada masyarakat lebih tau tentang yang sedang terjadi dan merasakan hal tersebut sehingga mereka yang menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang ada. Partisipasi masyarakat lekat dengan adanya upaya pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk kepedulian pemerintah, pemberdayaan masyarakat terbukti sangat membantu masyarakat dalam pelaksanaan suatu program yang telah direncanakan (Irawan, 2019). Partisipasi masyarakat menghasilkan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan memiliki arti mengidentifikasi, mengembangkan sebagai suatu bentuk dukungan yang diberikan kepada individu atau suatu kelompok tertentu yang bertujuan agar pihak yang ditargetkan dapat meningkatkan potensi lebih baik lagi. Menurut Widjayanti (2011), pemberdayaan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya, peluang, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat sehingga mereka mampu meningkatkan kapasitas diri dan merancang masa depan yang lebih baik.

Pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dapat terwujud dengan adanya keterlibatan dari masyarakat karena dampak yang dihasilkan sangat signifikan, dalam mengatasi masalah ekonomi lokal melalui keterlibatan masyarakat dapat melalui pengikutsertaan masyarakat dalam hal perencanaan, pengambilan keputusan, dan mengimplementasikan suatu rancangan (Judijanto *et al.*, 2024). Keterlibatan masyarakat tidak jauh keterikatannya dengan kebijakan publik dari pemerintah karena kebijakan publik inilah yang juga memfasilitasi adanya keterlibatan masyarakat; seperti halnya pemberdayaan komunitas kecil, pembangunan infrastruktur untuk mendukung usaha lokal, maupun pengadaan fasilitas dan akses terhadap sumber daya yang mendukung pengembangan ekonomi lokal (Judijanto, *et al.*, 2024).

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang pelaksanaannya menggunakan pendekatan metode deskripsi kualitatif. Metode pendekatan ini kelompok peneliti gunakan untuk memahami secara mendalam terkait kondisi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan wisata di Desa Wisata Nglanggeran. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wisata

Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa wisata ini berjarak 25 km dari pusat Kota Yogyakarta dengan waktu tempuh perjalanan sekitar 1 jam untuk mencapai lokasi penelitian. Penelitian ini kemudian dilakukan dalam tiga tahapan besar; meliputi tahap persiapan, tahap pengumpulan data, dan tahap pengolahan data atau analisis hasil penelitian.

Ketiga tahap penelitian ini dilakukan sepanjang bulan Agustus s.d. November 2024 dengan melibatkan beberapa narasumber dari pihak *stakeholder* terkait dan juga masyarakat lokal. Lebih jauh, mengenai metode penelitian ini, kelompok peneliti memperkaya data yang diperoleh dengan memanfaatkan dua jenis data; yaitu dengan data primer dan juga data sekunder. Dalam upaya memenuhi sumber data sekunder, kelompok peneliti mengakses dan meninjau beberapa sumber-sumber literasi terkait kepengurusan di desa wisata melalui beberapa sumber seperti artikel jurnal, buku, berita, dan juga penelitian serupa lainnya. Kemudian, dalam upaya pengumpulan data primer, kelompok peneliti menggunakan metode observasi dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data.

Pada tahapan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, kelompok peneliti datang langsung ke Desa Wisata Nglanggeran untuk mengamati dan menganalisis permasalahan ada. Adapun narasumber yang menjadi informan wawancara dalam penelitian ini antara lain Ketua Pokdarwis, anggota Pokdarwis, anggota perangkat desa, dan juga masyarakat lokal. Pada tahapan selanjutnya, peneliti kemudian mengolah data hasil pengamatan yang diperoleh ke dalam bentuk dokumentasi deskriptif sebagai hasil pengamatan. Dari data hasil analisis inilah kelompok peneliti kemudian menyajikan hasil penelitian dan menarik kesimpulan dari kondisi yang ada di Desa Wisata Nglanggeran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa wisata merupakan salah satu bentuk percepatan pertumbuhan perekonomian desa secara terpadu yang mendorong adanya transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2021). Pernyataan ini juga sejalan dengan adanya dukungan pengembangan desa wisata di banyak daerah di Indonesia. Tujuan dari pengembangan desa wisata pada umumnya adalah untuk memaksimalkan dampak pariwisata terhadap potensi desa di Indonesia secara sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan. Kegiatan wisata yang dikemas dalam bentuk desa wisata merupakan bentuk kegiatan wisata yang berbasis pada masyarakat. Penekanan kata masyarakat dalam kegiatan desa wisata ini membuat pelibatan peran masyarakat menjadi sangat krusial sehingga dapat disebut sebagai faktor penggerak dari pengembangan suatu desa wisata (Suherlan *et al.*, 2022). Pendekatan yang kolaboratif dalam pengembangan desa wisata juga merupakan suatu instrumen pendukung yang dapat memaksimalkan kinerja dari desa wisata. Wujud kolaborasi yang tinggi dari masyarakat tidak hanya menjadi tolak ukur dari keberhasilan sebuah desa wisata, tetapi juga sarana pemberdayaan yang dapat menyelesaikan masalah dan mengembangkan potensi dari sebuah desa wisata (Ulum & Suryani. 2021).

Desa Wisata Nglanggeran merupakan salah satu desa wisata terkenal di DI Yogyakarta dan telah memiliki banyak prestasi dalam banyak bidang. Desa wisata ini terletak Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini secara administrasi terdiri dari lima dusun yaitu Dusun Karang Sari, Dusun Doga sebagai pusat pemerintahan desa, Dusun

Nglanggeran Kulon, Dusun Nglanggeran Wetan, dan Dusun Gunung Butak (Masterplan Desa, 2020). Kesuksesan desa wisata ini berawal dari kegiatan karang taruna yang merintis kegiatan konservasi pada kawasan Desa Wisata Nglanggeran. Kegiatan yang dirintis oleh kelompok pemuda ini, kemudian seiring berjalannya waktu berkembang menjadi kelompok sadar wisata, sebelum kemudian ditetapkan menjadi desa wisata pada tahun 2007. Kemudian, pada tahun inilah kegiatan wisata di Desa Wisata Nglanggeran mulai berjalan secara intens hingga saat ini. Pada tahun 2021, Desa Wisata Nglanggeran ditetapkan sebagai desa wisata terbaik di dunia oleh UNWTO. Atraksi utama yang dimiliki oleh Desa Wisata Nglanggeran berupa wisata alam berupa Situs Gunung Api Purba Nglanggeran sebagai Geosite dari Gunung Sewu UNESCO Global Geopark yang diakui di dunia sejak tahun 2015, selain wisata alam, Desa Wisata Nglanggeran juga menawarkan wisata edukasi dan budaya sebagai daya tariknya (Hermawan, 2016).

Lebih jauh mengenai popularitas desa wisata ini, Desa Wisata Nglanggeran juga memiliki berbagai prestasi yang membanggakan. Berdasarkan Jaringan Destinasi Wisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada tahun 2021 dan laman Desa Wisata Nglanggeran (2023), desa ini telah meraih berbagai penghargaan dan prestasi. Beberapa di antaranya termasuk Juara II Pokdarwis Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2013, Penghargaan Desa Wisata Terbaik dan Desa Wisata Berkelanjutan 2021 oleh Kemenparekraf, serta Pemenang Desa Wisata Terbaik ASEAN dengan konsep Community-Based Tourism (CBT) tahun 2017. Prestasi yang membanggakan ini juga ikut serta dalam meningkatkan popularitas Desa Wisata Nglanggeran, tidak hanya di kalangan wisatawan domestik, tetapi juga di tingkat internasional.

1. Keterlibatan Masyarakat

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa keterlibatan masyarakat Desa Nglanggeran dapat dikatakan cukup banyak. Meskipun demikian, perbedaan persentase antara masyarakat yang terlibat langsung dan yang tidak terlibat langsung masih menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan wisata di Desa Wisata Nglanggeran berkisar antara 30% hingga 40%, yang mencerminkan selisih antara masyarakat yang terlibat dan yang tidak terlibat secara langsung. Partisipasi langsung masyarakat lokal umumnya terlihat dalam berbagai aktivitas kepariwisataan, seperti menjadi pengelola Pokdarwis atau bekerja sebagai pemandu wisata. Sementara itu, keterlibatan tidak langsung biasanya tercermin dalam kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dijalankan oleh masyarakat sekitar. Meskipun demikian, angka partisipasi Desa Wisata Nglanggeran ini dapat dikatakan kurang maksimal apabila dibandingkan dengan desa wisata terkenal lainnya seperti Desa Wisata Dewi Peri di Umbulharjo, Yogyakarta. Menurut termuan Lestari, et al., (2016) angka partisipasi Masyarakat lokal di Desa Wisata Dewi Peri ini menyentuh angka yang signifikan yaitu mencapai 70% dari seluruh Masyarakat lokal. Angka persentase partisipasi masyarakat ini juga dapat mencerminkan berhasil atau tidaknya suatu program karena dalam realitas yang ada masyarakat, sehingga partisipasi aktif ini juga dapat menjadi solusi terbaik dari permasalahan yang ada (Irawan, 2019).

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan penelitian, kesempatan pengembangan *skill* di Desa Wisata Nglanggeran dapat secara adil diakses oleh seluruh masyarakat. Pengembangan *skill* ini biasanya dikemas ke dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, dan *sharing profit* yang dapat diakses secara umum tanpa membedakan kriteria tertentu. Kegiatan pemberdayaan ini ditujukan untuk memaksimalkan dampak atau manfaat yang dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali (Widjayanti. 2011). Praktik ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 72 Tahun 2020 tentang pentingnya penekanan pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui desa wisata.

“Biasanya pelatihannya banyak untuk yang belum punya usaha UMKM, kebanyakan dari kakao coklat, etawa, sablon...,” Transkrip wawancara dengan Informan ke-5 (Masyarakat Lokal).

“Semuanya sama, pelatihan, sosialisasi, kemudian sharing profit dari pengelolaan desa wisata. Salah satu nya setiap padukuhan itu setiap bulan kami transferin uang nya, dari hasil kegiatan wisata secara tidak langsung masyarakat secara umum mereka akan mendapatkan nilai manfaat secara ekonominya, walaupun tidak harus banyak ya, yang penting dapat terdistribusi,” Transkrip wawancara dengan Informan ke-1 (Ketua Pokdarwis).

Manfaat pelibatan masyarakat di Desa Wisata Nglanggeran tidak hanya terfokus pada kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi secara merata kepada seluruh masyarakat, tetapi juga dalam pendistribusian manfaat ekonomi dari desa wisata. Pendistribusian manfaat dari kegiatan wisata di Desa Wisata Nglanggeran dilakukan setiap bulan sekali kepada keseluruhan padukuhan di wilayah Desa Nglanggeran agar keuntungan kegiatan desa wisata dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

“Itu setiap bulan, itu langsung setiap pedukuhan-pedukuhan itu langsung masing-masing ditransfer dari Pokdarwis untuk padukuhan. Kurang lebih 300 ribu per bulan dan 10% untuk Bumdes,” Transkrip Informan ke-2 (Seksi Management Lingkungan).

“... Sifat dari organisasi ini ‘kan, ya dari masyarakat, untuk masyarakat. Jadi, tentu semua masyarakat yang tergabung menjadi bagian dari Desa Wisata Nglanggeran juga mendapatkan hasilnya, meskipun tetap ada perbedaan dalam jumlah, namun diusahakan merata,” Transkrip wawancara dengan informan ke- 3 (Pengelola Kebersihan dan Ketertiban)

Meskipun kesempatan edukasi, pemberdayaan, dan pendistribusian ekonomi di Desa Nglanggeran dapat dikatakan merata, nyatanya masih terdapat beberapa isu terkait keterlibatan masyarakat yang kemudian mempengaruhi efektivitas kepengurusan pokdarwis dan isu kepengurusan ganda. Masalah regenerasi di Desa Wisata Nglanggeran dan juga kurangnya keterlibatan masyarakat secara luas menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Desa Wisata Nglanggeran. Temuan ini selaras dengan temuan penelitian sebelumnya oleh Wijaya & Maryunani (2022) terkait ketidakmerataan partisipasi masyarakat Desa Nglanggeran.

Kelompok peneliti menemukan data bahwasanya persebaran dan pelibatan aktif masyarakat Desa Wisata Nglanggeran hanya berkonsentrasi pada tiga dusun dari total lima dusun di Desa Wisata Nglanggeran. Permasalahan ini kemudian tak jarang menimbulkan rasa iri antar dusun karena merasa tidak diikutsertakan dalam kegiatan wisata di Desa Wisata Nglanggeran. Ketidakmerataan persebaran ini kemudian memunculkan permasalahan regenerasi anggota Pokdarwis dan juga desa wisata karena keterbatasan sumber daya yang memadai.

“... Nglanggeran sendiri ada lima dusun, tapi yang aktif dalam kegiatan wisata hanya tiga dusun saja sehingga dua dusun lainnya jadi iri. Tapi, di sisi lain memang dari dua dusun tersebut ga mau gabung, ya ada sih yang mau bergabung dalam partisipasi kegiatan wisata, namun lebih banyak yang ga mau gabung. Warga dari dua dusun itu lebih memilih buat kerja di luar daripada hanya mengandalkan di Nglanggeran saja,” Transkrip wawancara dengan informan ke- 3 (Pengelola Kebersihan dan Ketertiban).

“Untuk regenerasi masih susah karena SDM masih kurang. Memang banyak dari Nglanggeran anak mudanya, cuman mereka lebih memilih kerja di lapangannya, bukan di pengurus inti Pokdarwis maupun perangkat desa. Terus, kebutuhan mereka juga banyak sebagai anak muda, jadi kalau hanya berfokus mengandalkan satu pekerjaan di Nglanggeran saja belum tentu cukup untuk menutup kebutuhannya,” Transkrip wawancara dengan informan ke- 3 (Pengelola Kebersihan dan Ketertiban).

Permasalahan rasa iri antar dusun ini, selain menjadi pemantik dari permasalahan regenerasi dan rasa memiliki terhadap desa wisata. Permasalahan semacam ini dalam jangka panjang dapat menimbulkan permasalahan terkait kesatuan sinergi di Desa Wisata Nglanggeran. Temuan ini juga mendukung pernyataan dari penelitian sebelumnya oleh Herdiana (2019) yang menunjukkan bahwasanya permasalahan umum desa wisata untuk memunculkan rasa memiliki, cinta, dan juga bangga terhadap kegiatan pariwisata masih banyak dijumpai. Pernyataan semacam ini dapat dilihat dari adanya oknum yang kurang cocok dengan kegiatan pariwisata di Desa Nglanggeran. Ketidakcocokan ini disebabkan oleh penghasilan yang didapatkan masih kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga lebih memilih menjadi petani atau merantau.

“Mungkin ya, nggak maksudnya nggak suka atau emang masuk ke wisata kurang kurang cocok ya itu cari luar,” Transkrip Informan ke-2 (Seksi Management Lingkungan).

“... Ya mungkin, anak-anak muda sini cari pengalaman atau cari modal untuk buka usaha, kebanyakan buat bangun rumah, beli hewan ternak, beli truk juga ada, ” Transkrip informan ke-5 (Masyarakat Lokal).

Pada dasarnya, Pengelola Desa Wisata Nglanggeran telah memberlakukan pembinaan kelompok muda dari posisi paling praktis, seperti di bidang kebersihan, parkir, hingga menjadi *guide* sebagai upaya regenerasi kepengurusan yang bertanggung jawab. Akan tetapi, sebagai sektor yang cenderung fluktuatif hal ini menjadi alasan lainnya mengapa mayoritas pemuda di

Desa Wisata Nglanggeran cenderung memilih untuk mencari modal kerja di luar desa. Kepastian pendapatan serta keinginan mendapatkan lingkungan kerja yang baru juga menjadi alasan kelompok pemuda untuk mencari kerja di luar desa.

“... Harus semua bisa, jadi tidak harus monoton, semuanya harus mencakup, untuk guide, parkir... Harus semua. Dari bawah, dari tukang sapu, tukang parkir, tidak dibeda-bedakan. Pak Mursidi juga nyapu, Mas Aris juga nyapu, jadi bareng-bareng nggak ada jenjang....Anak-anak muda kita latih dari bawah, dari parkir...Biasanya anak muda lebih cekatan daripada yang tua-tua kalau ada tamu yang datang gitu gitu...Begitupun guide, semuanya juga dilatih harus bisa menjadi guide...,” Transkrip informan ke-6 (anggota Pokdarwis seksi homestay).

Meskipun masih ada beberapa ketidakcocokan dalam kegiatan wisata di Nglanggeran, sebagian besar dari masyarakat lokal merasakan dampak positifnya. Salah satu dampak yang dirasakan adalah melalui program sosialisasi dan pemberdayaan yang rutin diadakan, terutama untuk warga yang belum memiliki usaha sehingga mereka bisa mengembangkan keterampilan dan potensi yang ada. Melalui kegiatan Pemberdayaan ini masyarakat diberikan kesempatan yang sehingga potensi yang ada masih dapat berkembang. Hal ini kemudian menjadi hal yang begitu diupayakan oleh pihak Desa Nglanggeran, seperti yang diungkapkan oleh Liu, *et al.*, (2023) yang mengungkapkan bahwa peran pemerintah dan masyarakat lokal yang mengatur kebijakan dan implementasinya perlu dilakukan untuk mencapai kesejahteraan dan keseimbangan yang optimal bagi masyarakat desa. Dalam kasus Desa Wisata Nglanggeran ini, pihak perangkat desa mengungkapkan bahwa mereka mengupayakan untuk dapat terus memfasilitasi kegiatan wisata agar dapat memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Kepengurusan Pokdarwis dan Desa Wisata

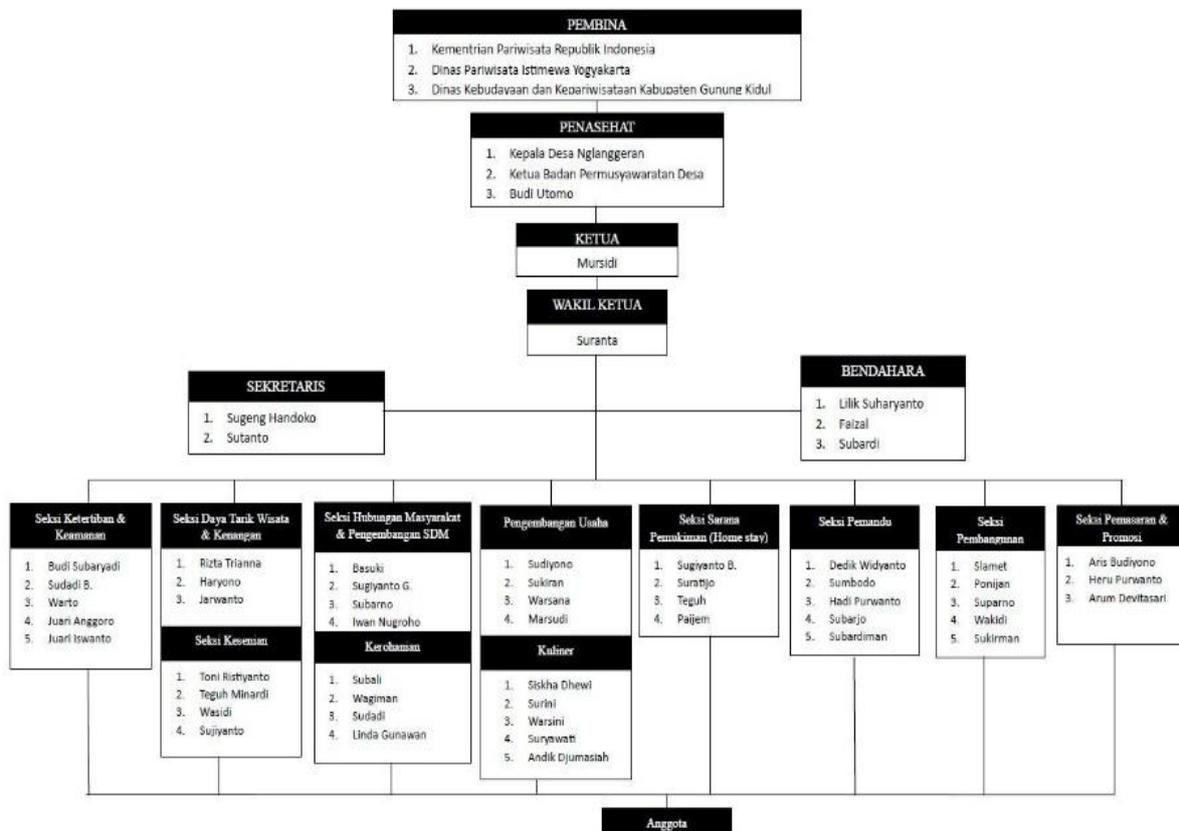
Desa Wisata Nglanggeran memiliki struktur pengelolaan yang dilaksanakan secara penuh oleh Pokdarwis dengan bantuan dari pemerintah desa. Temuan menarik dalam kelembagaan Desa Wisata Nglanggeran adalah adanya kepengurusan ganda yang tidak hanya dijumpai pada kepengurusan Pokdarwis dan pemerintahan desa, tetapi juga pada kepengurusan organisasi desa wisata dan Pokdarwis. Peran ganda yang ditetapkan oleh pemerintah Desa Wisata Nglanggeran ini tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 40 tahun 2020, dalam peraturan ini tertulis pedoman kepengurusan desa wisata yang terdiri dari dua unsur kelompok pengurus, yaitu kelompok sadar wisata atau Pokdarwis dan kampung wisata atau desa wisata. Namun, berdasarkan data hasil wawancara yang didapatkan oleh kelompok peneliti, terdapat beberapa kondisi non ideal yang ada di Desa Wisata Nglanggeran sebagai wujud siasat untuk mengefektifkan kepengurusan Pokdarwis dan desa wisata.

“Kebetulan, kalau di Nglanggeran yang selama ini kita lakukan, Pokdarwis ya pengelola desa wisata. Itu yang jadi kesepakatan kami agar tidak ada dobel lembaga yang mengurus masalah kepariwisataan, walaupun secara tugas pokok dan fungsinya itu berbeda, tetapi ‘kan orang sama. Waktu menyampaikan Sapta Pesona, ya pakai baju Pokdarwis dan kalau kita

nyampein paket wisata, ya kita pakai baju desa wisata,” Transkrip Informan ke-1 (Ketua Pokdarwis).

Wujud penggabungan ini disebutkan sebagai sarana yang paling pas dan sesuai dengan kondisi lapangan Desa Wisata Nglanggeran guna memaksimalkan sumber daya yang terbatas. Dalam fenomena ini, sikap yang dilakukan oleh pengurus desa wisata dan juga Desa Nglanggeran sebenarnya dapat dikatakan sebagai solusi jangka pendek yang dapat menyelesaikan permasalahan ini. Hanya saja, upaya yang dilakukan dengan cara menggabungkan struktur kepengurusan Pokdarwis dengan struktur kepengurusan desa wisata dengan anggota yang sama, mulai dari ketua hingga seksi-seksi didalamnya, masih belum dapat menyelesaikan isu regenerasi Kepengurusan Pokdarwis dan desa wisata yang notabene masih perlu diselesaikan. Selaras dengan pernyataan-pernyataan para anggota Pokdarwis dan juga perangkat desa yang menganggap bahwasanya penggabungan kepengurusan ini menjadi sarana untuk menyelaraskan komunikasi, agar meminimalisasi konflik antara kepengurusan Pokdarwis dan perangkat desa.

“...Ya karena orang-orangnya itu-itu saja, mau siapa lagi, mau cari yang lain dan mendirikan yang lain? ‘Kan susah, tapi diizinkan yaudah jadi satu... Semua struktur sama, sumber daya buat meningkatkan pendapatan,” Transkrip informan ke-2 (Pengelola Manajemen Lingkungan).



Gambar 2. Struktur Desa Wisata Nglanggeran
Sumber: Pengurus Pokdarwis

Kondisi yang terjadi di Desa Wisata Nglanggeran ini, tentu saja menjadi suatu hal tidak biasa dan tidak ideal. Namun, kondisi ini juga seakan memunculkan pertanyaan baru terkait Pergub Nomor 40 tahun 2014 terkait “kondisi ideal” lapangan yang seharusnya. Pasalnya, menurut pernyataan seluruh informan yang kelompok peneliti dapatkan, mereka mengungkapkan bahwasanya kepengurusan ganda dalam kelompok pokdarwis dan juga desa wisata ini justru memberikan dampak positif terkait dengan efektivitas kinerja para anggotanya. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan terkait keefektifan pengimplementasian lapangan dari kebijakan publik berupa Pergub Nomor 40 tahun 2020 yang seharusnya menjadi tugas pemerintah untuk mengatur terkait keterlibatan masyarakat (Judijanto *et al.*, 2024).

“... Kalau di Desa Wisata Nglanggeran sama, tapi secara umum di peraturan itu pengelola desa wisata itu lebih simpel paling pengurus kemudian anggota... Selama ini kami jadi satu, otomatis kami tidak memisahkan pengurus desa wisata seksi pemanduan dengan Pokdarwis seksi pemanduan. Jadi, tidak jadi double job. Kalau idealnya sesuai pergub itu sendiri-sendiri. ... Memang kalau pergub itu kan juga ada review, tapi juga menurut saya, itu ya diserahkan kepada masyarakat, terlepas nanti ada payung hukum yang menaunginya. ... Tergantung kenyamanan dan bisa berjalan berdasarkan kesepakatan masyarakat. ... Cari satu anggota aja susah apalagi dua kepengurusan,” Transkrip informan ke-1 Ketua Pokdarwis.

“...Kalau anggotanya sih pasang surut, kadang masuk kadang keluar. Apalagi pas pandemi kemarin karena benar-benar kegiatan wisata off, jadi pada cari kerjaan di luar dan nggak kembali kesini,” Transkrip wawancara dengan informan ke- 3 (Pengelola Kebersihan dan Ketertiban).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa isu kepengurusan ganda di Pokdarwis dan juga Desa Wisata ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya yang memadai dan juga guna mengurangi timbulnya konflik internal. Temuan hasil wawancara ini seakan mendukung pernyataan dari Devkant & Bagri (2018) dan Murdiyanto (2011) mengenai kondisi masyarakat desa, menjadi modal utama dalam penyelesaian masalah di desa wisata dan juga terkait perihal keterbatasan pendidikan faktor hambatan praktikal pada keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pariwisata. Selain itu, permasalahan kurangnya sumber daya juga dibentuk dari pandangan bahwasanya anak-anak muda di Desa Wisata Nglanggeran masih dianggap belum berpengalaman dan belum bisa bertanggung jawab secara penuh untuk ikut tergabung dalam struktur kepengurusan Pokdarwis dan desa wisata di Desa Nglanggeran ini.

“... Anak muda yang munculnya baru terlibat beberapa tahun, itu kurang lebih tiga atau empat tahun untuk terlibat ke desa wisata... Yang secara bertanggung jawab langsung masih belum keliatan. Ibaratnya, kalau pengelolaan desa wisata ini salah taruh, itu yakin ini, saya yakin nggak menjamin bisa lancar,” Transkrip informan ke-2 (Pengelola Manajemen Lingkungan).

“... Mereka harus didorong dulu, tapi kalo diajak, ya ayo-ayo aja mereka itu, meski skillnya belum memadai. Masih jauh dari kata layak dan belum terlihat, terutama di aspek kepemimpinan, dan untuk membangun hal itu juga perlu waktu yang lama, sama seperti membangun Nglanggeran sendiri,” Transkrip wawancara dengan informan ke- 3 (Pengelola Kebersihan dan Ketertiban).

Isu ini lantas semakin membuat pertanyaan baru terkait perlu atau tidaknya Pergub Nomor 40 Tahun 2020 ini direvisi guna menyesuaikan kondisi lapangan masing-masing desa wisata atau justru setiap desa wisata harus dapat mengatasi hal internal ini—tanpa terkecuali. Beberapa narasumber, seperti Ketua Pokdarwis dan juga perangkat desa menginterpretasikan peraturan ini sebagai peraturan untuk masyarakat dan seharusnya disesuaikan dengan kondisi lapangan yang seharusnya. Hal ini dikarenakan hingga saat ini pun Pergub Nomor 40 Tahun 2020 masih bersifat tidak mengikat secara pasti terkait praktik lapangan yang menjadi acuan. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi praktik kepengurusan ganda di Desa Wisata Nglanggeran hingga saat ini.

3. Kepengurusan Pokdarwis dan Desa Wisata

Kepengurusan Pokdarwis menjadi hal yang penting dalam keberlangsungan Desa Wisata Nglanggeran. Pokdarwis memiliki fungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan dan pengembangan potensi wisata. Akan tetapi, terdapat beberapa kondisi di Desa Wisata Nglanggeran yang dianggap kurang ideal, termasuk terdapat kepengurusan ganda antara kelembagaan Pokdarwis dengan perangkat desa. Hal ini tentu bertolak belakang dengan Pergub Nomor 40 Tahun 2020 Pasal 8 (7) yang menjelaskan bahwa pengurus Pokdarwis bukanlah dari perangkat desa atau kelurahan dan membedakan ketentuan antara Pokdarwis dan perangkat desa dalam suatu desa wisata dalam bagian yang berbeda. Meskipun kejadian tersebut bertolak belakang dalam peraturan tersebut, kepengurusan ganda ini dinilai efektif bagi Pokdarwis dan perangkat desa terutama dalam komunikasi dan penyelarasan tujuan antarkeduanya serta meminimalisir konflik antar lembaga untuk keberlangsungan Desa Wisata Nglanggeran. Hal ini dapat dilihat melalui wawancara terhadap perangkat Desa Nglanggeran, yang mengungkapkan bahwa peran anggota Pokdarwis di perangkat desa dapat membantu menyuarkan aspirasi kegiatan wisata kepada pemerintahan desa.

“Kalau kita lebih ke kebijakan sih, kalau desa itu, kebijakan-kebijakan penyesuaian aturan atau mungkin anggaran. Ketika Pokdarwis mengajukan anggaran ke desa yang itu belum diampu oleh yang lain karena di wisata itu kan banyak CSR atau kedinasan yang masuk untuk pendanaan itu.... Apa yang belum tercover dari dana-dana itu? Nah, desa itu masuk.... Biasanya penyediaan lahan karena kita punya kas desa juga, kalau misalnya pokdarwis butuh lahan yang sekiranya bisa dikelola bekerja sama dengan pokdarwis nah itu kita menyediakan itu.... Kalau misalnya butuh peningkatan kapasitas, pengolahan makanan atau pelatihan, nah itu desa bisa handle ataupun mendanai,” Transkrip wawancara dengan informan ke- 4 (Perangkat Desa Nglanggeran).

Meskipun demikian, pihak perangkat desa maupun Pokdarwis mensiasati kepengurusan ganda ini agar “tidak menyalahi” aturan dengan cara tidak mencantumkan secara formal anggota Pokdarwis yang tergabung dengan perangkat desa di struktur Keanggotaan Pokdarwis, tetapi tetap menjadikan oknum pengurus ganda ini sebagai penasehat dalam kepengurusan Pokdarwis. Hal ini diungkapkan dalam wawancara dengan perangkat desa bahwa meskipun beberapa anggota pokdarwis yang telah menjabat menjadi perangkat desa sudah tidak diperbolehkan menjadi anggota dari Pokdarwis, tetapi tetap dilibatkan dalam pengambilan keputusan desa.

“... Ya, personilnya tidak boleh masuk dalam kepengurusan... Tapi, memang secara penugasan, saya sudah nggak terlibat disana, pengelolaan keuangan, saya sudah tidak terlibat didalamnya... Lebih kemikalnya musyawarah terkait dengan kemajuan, terkait dengan regenerasinya itu biasanya saya tetap dilibatkan di sana, diajak musyawarah begitu,” Transkrip dengan informan ke- 4 (Perangkat Desa Nglanggeran yang pernah menjadi anggota Pokdarwis).

Dari pengakuan perangkat desa lewat wawancara tersebut dapat ditarik benang merah bahwa pihak pengelola memang mengakui adanya kepengurusan ganda ini dan secara sadar, jika hal tersebut menyalahi aturan pemerintah. Akan tetapi, kembali lagi pada fakta di lapangan yang ada, banyak fenomena yang mengharuskan, mau tidak mau, dilakukannya kepengurusan ganda, baik mengenai sumber daya manusia maupun regenerasi untuk mewujudkan lingkungan dan kegiatan yang kondusif. Pun, diungkapkan bahwa dengan adanya anggota Pokdarwis yang “masuk” dalam jajaran perangkat desa dapat lebih memudahkan koordinasi antara Pokdarwis dan desa.

KESIMPULAN

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dampak dari kepengurusan ganda pada Pokdarwis atau kelompok sadar wisata di Desa Wisata Nglanggeran Yogyakarta. Lebih lanjut, melalui penelitian ini kelompok peneliti ingin mengetahui alasan dibalik adanya fenomena kepengurusan ganda di Desa Wisata Nglanggeran yang terkenal akan banyaknya penghargaan dan prestasi yang dimiliki. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan penelitian terdahulu terkait Desa Wisata Nglanggeran.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, data di lapangan di desa wisata terbaik di Indonesia ini masih memiliki isu terkait kepengurusan dalam pengelolaannya. Isu yang muncul di Desa Wisata Nglanggeran ini adalah terkait kepengurusan ganda yang terdapat pada keanggotaan Pokdarwis dengan desa wisata serta Pokdarwis dengan perangkat desa. Fenomena kepengurusan ganda ini tentu saja tidak sesuai dengan Pergub Nomor 40 Tahun 2020 Pasal 8 (7) yang mengatur keanggotaan Pokdarwis yang harus berbeda dengan pengurus desa wisata dan juga perangkat desa. Hanya saja, berdasarkan hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa isu ini merupakan siasat yang digunakan oleh Desa Wisata Nglanggeran untuk mengefektifkan kegiatan kepariwisataan mereka. Hal ini menjadi solusi yang tepat karena kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam kepengurusan Pokdarwis maupun pengurus desa.

Diantara permasalahan kepengurusan ganda di Desa Wisata Nglanggeran, hal ini justru dinilai efektif oleh semua pihak dalam meminimalisasi adanya konflik atau ketegangan yang rawan muncul dalam pengelolaan desa wisata. Penyuaran aspirasi kelompok sadar wisata atau Pokdarwis dalam pemerintahan desa juga melatarbelakangi adanya kepengurusan ganda dalam kepengurusan perangkat desa. Perlunya komunikasi yang jelas dengan pihak desa dengan memanfaatkan anggota perangkat desa sebagai penasehat Pokdarwis juga seakan juga menjadi salah satu faktor adanya hingga saat ini kegiatan kepariwisataan di Desa Wisata Nglanggeran dapat terus bersinergi dengan baik dengan pemerintahan desa tanpa adanya konflik. Lebih lanjut, peran anak muda dari desa kebanyakan lebih memilih untuk berkecimpung di lapangan sebagai pemandu wisata daripada kepengurusan membuat proses regenerasi menjadi terhambat. Di sisi lain, kemampuan anak muda dalam mengelola dan memimpin kepengurusan dinilai belum cukup menjadi kendala dalam melakukan regenerasi anggota kepengurusan.

Keterlibatan secara tidak langsung dari masyarakat sekitar pun dapat terlihat dari partisipasi mayoritas yang terfokus lebih banyak pada kegiatan UMKM; yang meliputi olahan coklat, susu kambing etawa, dan batik; serta dalam pengelolaan atraksi yang meliputi alam dan budaya, kuliner, juga akomodasi seperti penginapan. Belum lagi, temuan yang menunjukkan bahwasanya terdapat sebagian masyarakat yang enggan terlibat dan terkesan menolak segala bentuk kegiatan wisata yang ada di Desa Wisata Nglanggeran sehingga memilih untuk bertani, berkebun, maupun mencari mata pencaharian lainnya di luar Desa Wisata Nglanggeran menjadi faktor lain dari isu keterlibatan masyarakat dalam desa wisata ini. Dari fenomena tersebut juga membuktikan bahwa terdapat ketidakmerataan dari partisipasi masyarakat, terutama terdapat fakta yang ditemukan melalui transkrip hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya yang bersumber dari salah satu informan, memaparkan bahwa terdapat dua dusun dari lima dusun yang tidak dilibatkan dalam kegiatan wisata di Desa Wisata Nglanggeran. Pada akhirnya, timbul keirian akibat dari ketidakmerataan partisipasi masyarakat dalam kegiatan wisata di Desa Wisata Nglanggeran yang berpusat hanya di tiga dusun saja. Meskipun begitu, pembagian hasil dari kegiatan wisata dibagikan secara merata dengan jumlah yang ditetapkan kepada masing-masing dusun sehingga membantu perekonomian masyarakat setempat, hal ini selaras dengan prinsip “Dari masyarakat, untuk masyarakat” yang juga telah disampaikan oleh informan dalam wawancara yang dilakukan sebelumnya.

Berangkat dari hasil temuan ini, peran kebijakan publik dalam mengatur berjalannya kegiatan kepariwisataan di suatu desa wisata perlu dikaji lebih jauh lagi, terutama dalam kelembagaan Pokdarwis dan perangkat desa. Dinamika yang berbeda dari setiap kawasan desa wisata seakan menjadi tolak ukur baru, seharusnya digunakan sebagai pertimbangan dalam perumusan peraturan kelembagaan dalam suatu desa wisata dan disesuaikan kembali terhadap kondisi tiap desa wisata. Untuk penelitian ke depannya, kelompok peneliti menyarankan pengkajian perspektif pengurus wisata terkait Pergub Nomor 40 Tahun 2020 ini perlu dilakukan. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi keunggulan dan juga ketidaksesuaian aturan terhadap kondisi lapangan, antara realitas dan idealitas yang dapat membantu para pemangku kepentingan mengevaluasi peraturan ini. Hal ini kemudian dapat membantu banyak desa wisata untuk terus berkembang dan berjalan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arintoko, Ahmad, A. A., Gunawan, D. S., & Supadi. (2020). Community-based Tourism Village Development Strategies: A Case of Borobudur Tourism Village Area, Indonesia. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 29(2), 389–413. <https://doi.org/10.30892/gtg.29202-477>.
- BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta. (2024). Daerah DIY - Desa Wisata dan Pokdarwis. Retrieved September 20, 2024, from https://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/cetak/211-desa-wisata-dan-pokdarwis
- Desa Wisata Nglanggeran. (2023). Desa Wisata Nglanggeran | Desa Wisata di Gunung Kidul Jogjakarta. Retrieved October 7, 2024, from <https://desawisatanglanggeran.id/>
- Desa Wisata Nglanggeran. (n.d.). *Jadesta*. Retrieved September 29, 2024, from <https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/nglanggeran>
- Herdiana, D. (2019, July). Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 6(1), 63–86. <https://doi.org/10.24843/JUMPA.2019.v06.i01.p04>
- Hermawati, P. R. (2020). Komponen Kepariwisata dan Pengembangan Community-based Tourism (CBT) di Desa Wisata Nglanggeran. *Pariwisata*, 7(1), 31–43.
- Hermawan, H. (2016, September). Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Pariwisata*, 3(2). Retrieved from <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jp>
- Irawan, A. (2019, July). Model Partisipasi Masyarakat dalam Program Kampung Siaga Aktif di Kampung Salor Indah Distrik Kurik Kabupaten Merauke. *Sospol*, 5(1), 40–60. <https://doi.org/10.22219/sospol.v5i1.6990>
- Judijanto, L., Heryadi, D. Y., Sihombing, R. S. M., Gusti, Y. K., & Semmawi, R. (2024). Rekeyasa Sosial Ekonomi: Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Lokal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*, 5(1). <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i1.24226>
- Kastenholz, E., Carniero, M. J., Marques, C. P., & Lima, J. (2012). Understanding and Managing the Rural Tourism Experience: The Case of A Historical Village in Portugal. *Tourism Management Perspectives*, 4, 207–214. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2012.08.009>
- Kemenparekraf. (2019, September). *Pedoman Desa Wisata*. Retrieved September 20, 2024, from <https://jadesta.kemenparekraf.go.id/getdata/file/Buku-Membangun-Desa.pdf>
- Kemenparekraf. (2021, November 4). Desa Wisata Nglanggeran jadi Wakil Indonesia Pada Ajang Best Tourism Village UNWTO. Retrieved November 20, 2024, from <https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Desa-Wisata-Nglanggeran-Jadi-Wakil-Indonesia-pada-Ajang-Best-Tourism-Village-UNWTO>

- Komariah, N., Saipuddin, E., & Yusup, P. M. (2018, December). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 3(2), 158–174. <https://doi.org/10.26905/jpp.v3i2.2340>.
- Lestari, G., Armawi, A., & Muhamad. (2016, August 25). Partisipasi Pemuda dalam Mengembangkan Pariwisata Berbasis Masyarakat untuk Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi di Desa Wisata Pentingsari, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, D.I. Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(2), 137–157. Retrieved from <http://jurnal.ugm.ac.id/JKN>
- Muhtadi. (2021, July 12). Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Memanfaatkan Potensi Lokal: Studi Kasus Pokdarwis Situ Pengasinan, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Retrieved from <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57303>
- Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran dengan konsep ekowisata. (2020, August 27). *Masterplan Desa*. Retrieved from <https://www.masterplandes.com/desa-wisata/pengembangan-desa-wisata-nglanggeran-dengan-konsep-ekowisata/>
- Policy and Destination Management | UN Tourism. (n.d.). Retrieved from <https://www.unwto.org/policy-destination-management>
- Prezenza, A. (2005). Towards a Model of the Roles and Activities of Destination Management Organizations. *Unimol*. Retrieved from https://www.academia.edu/1009194/Towards_a_model_of_the_roles_and_activities_of_destination_management_organizations.
- Razak, A. H. (2021, November 24). Ini Penyebab Sejumlah Desa Wisata di Sleman Mati Suri. *Harian Jogja*. Retrieved from <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/11/24/512/1089107/ini-penyebab>
- Reindrawati, D. (2023, January). Challenges of Community Participation in Tourism Planning in Developing Countries. *Cogent Social Experiment*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2164240>
- Riadi, M. (2021, September 15). Partisipasi Masyarakat (Prinsip, jenis, tingkatan dan faktor yang mempengaruhi). *KajianPustaka.com*. Retrieved October 17, 2024, from <https://www.kajianpustaka.com/2020/01/partisipasi-masyarakat.html>
- Santoso, A. A. P. (2022, November). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Wisata di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintah*, 7(2), 33–34. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i2.2930>
- Sudheer, A. (2021, May). Integrated Village Tourism for Rural Sustainability and Development: A Review of Village Tourism and Its Impact on the Environment and Society of Kumbalangi Model Tourism Village. *A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal*, 7(5).
- Sudibya, B. (2018, April). Wisata Desa dan Desa Wisata. *Jurnal BAPPEDA LITBANG*, 1(1).

- Suherlan, H., Adriani, Y., Evangelin, B. C., Rahmatika, C., Pah, D. A. S., Fauziyyah, I. J., Wibowo, L. A., & Hanafi, M. J. S. (2022). Keterlibatan Masyarakat dalam Mendukung Program Desa Wisata: Studi Deskriptif Kualitatif pada Desa Wisata Melung, Kabupaten Banyumas. *Jurnal Kajian Bahasa Dan Pariwisata*, 9(1), 99–111. <https://doi.org/10.34013/Barista.V9i01.623>
- Suhaimi, S. N., Putri, T. A., Harahap, A., & Furqan, A. (2024). Analisis penerapan community-based tourism (CBT) di Desa Wisata Mekarsari, Kabupaten Bandung. *Jurnal Industri Pariwisata*, 6(2), 160–173. <https://doi.org/10.36441/pariwisata.v6i2.1555>
- Sulistyo, A., Noviati, F., Yudiandi, T. A., Rahmawati, A., Suharyono, E., & Kristanto, D. A. (2023, November). Implementasi Prinsip Pariwisata Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Berbasis Masyarakat: Studi pada Desa Wisata Poncokusumo. *Journal of Research on Business and Tourism*, 3(2), 95–107. <https://doi.org/10.37535/104003220233>
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Ulum, S., & Suryani, D. A. (2021, March). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Gamplong. *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*, 3(1). Retrieved from <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/>
- Wahab, S., Sardjana Orba Alim, Firman Manullang, & Mansur, M. (2022, March 22). Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Strategi. *ResearchGate*. PT. Gaptrek Media Pustaka. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/361611930_Pemberdayaan_Masyarakat_Konsep_dan_Strategi
- Web Portal Gunungkidul. (n.d.). Web Portal Gunungkidul. Retrieved September 29, 2024, from <https://gunungkidulkab.go.id/D-2709e22722693a5e40ce21760357557e-NW-3e2d4cf993d08251a683cb8e77036809-0.html>
- Wijaya, L., & Maryunani. (2022). Analisis Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(3). <https://doi.org/10.21776/jdess.2022.01.3.02>
- Wang, M., Jiang, J., Xu, S. J., & Guo, Y. (2021, February 24). Community Participation and Residents' Support for Tourism Development in Ancient Villages: The Mediating Role of Perceptions of Conflicts in the Tourism Community. *MDPI*. <https://doi.org/10.3390/su13052455>
- Yacob, S., Qomariyah, N., Marzal, J., & Mulyana, A. (2021). Strategi Pemasaran Desa Wisata. *WIDA Publishing*. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=BF9BEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1>